



MENENTUKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN MENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIT KERJA

Marfuah Nur Fatimah¹, Mardiana², Alwan Subhan

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Makassar, Indonesia

Email: marfuaahnurfatimahanwar@gmail.com

Abstrak. Optimalisasi alokasi anggaran pendidikan sangat penting untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan sistem pendidikan di semua jenjang. Kajian ini mengkaji alokasi anggaran pendidikan secara strategis dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja yang terstruktur bagi satuan kerja. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan perspektif holistik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa pengalokasian paling sedikit 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Strategi pengelolaan yang efektif harus mengutamakan perencanaan yang sistematis, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan efisiensi dalam pelaksanaan. Evaluasi secara berkala juga penting untuk menjamin bahwa dana digunakan secara optimal dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Melalui pendekatan terpadu ini, pengelolaan anggaran pendidikan secara signifikan mendukung tercapainya capaian pendidikan yang berkelanjutan dan kemajuan kelembagaan.

Kata kunci: Alokasi anggaran pendidikan, penganggaran unit kerja, perencanaan keuangan strategis.

Abstract. Optimizing the allocation of the education budget is essential to ensure the effectiveness and sustainability of the education system at all levels. This study examines the strategic allocation of the education budget and the preparation of a structured revenue and expenditure budget for work units. Using a qualitative descriptive approach, this study provides a holistic perspective on how financial management in educational institutions is planned, implemented, monitored, and evaluated. The research findings confirm that allocating at least 20% of the State Budget (APBN), as mandated by the 1945 Constitution, is essential to meet both tangible and intangible educational needs. An effective management strategy must prioritize systematic planning, encourage transparency and accountability, and ensure efficiency in implementation. Periodic evaluation is also important to ensure that funds are used optimally and contribute to improving the quality of education. Through this integrated approach, education budget management significantly supports the achievement of sustainable educational outcomes and institutional progress.

Keywords: Education budget allocation, work unit budgeting, and strategic financial planning.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di tingkat sekolah. Setiap upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sangat bergantung pada kecukupan biaya. Tanpa biaya yang memadai, proses pendidikan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Dalam cakupan yang lebih luas, biaya pendidikan mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun tenaga yang bisa dinilai secara ekonomi. Dengan kata lain, biaya ini mencakup semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sistem pendidikan secara menyeluruh (Batubara, 2022).

Setiap unit kerja pasti menghadapi tantangan dalam pengelolaan, termasuk di lembaga pendidikan. Dimana upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang sederhana, karena mencakup berbagai persoalan teknis maupun kompleksitas yang melibatkan perencanaan, pendanaan, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang profesional dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran (Yuspiani & Hidayat, 2022).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan

menyeluruh mengenai realitas sosial serta fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai subjek penelitian. Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi karakteristik, sifat, pola, dan ciri utama dari fenomena yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi konteks dan makna di balik fenomena tersebut dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari partisipan, sehingga hasil penelitian mencerminkan situasi yang autentik (Rahmadoni, 2018). Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap informasi secara mendalam dan terperinci mengenai fenomena tertentu. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang nyata tetapi juga memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembaca mengenai konteks penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan

Menurut Supriyono yang dikutip oleh Dinda (2019), biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Secara sederhana, biaya merepresentasikan bentuk pengeluaran. Dalam perspektif ekonomi, pengeluaran ini bisa berupa uang atau aset moneter lainnya. Dalam konteks pendidikan, pembiayaan mengacu pada sumber dana yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sistem pendidikan, seperti pembangunan fasilitas, pembayaran gaji tenaga pendidik, penyediaan bahan ajar, pemberian beasiswa, serta aspek lain yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan. Peran pembiayaan pendidikan sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas



dan aksesibilitas pendidikan di suatu negara (Sudarmono et al., 2021), yang pada akhirnya mendorong kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Adapun pendidikan menurut Jean Piaget, merupakan sebuah proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Seorang psikolog beraliran behavioristik bernama B.F. Skinner, mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan perilaku (Harefa et al., 2024). Sementara itu, Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan budi pekerti, yang mencakup pembentukan karakter, kemampuan berpikir, serta kesehatan fisik dan mental anak (Lembong et al., 2023). Sedangkan, Imam Al-Ghazali menilai pendidikan sebagai usaha untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan nilai-nilai moral yang baik (Suryadarma & Haq, 2015).

Selanjutnya, istilah "pembiayaan" digabungkan dengan "pendidikan" menjadi "pembiayaan pendidikan," mengacu pada total dana yang diperlukan dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Levin menambahkan bahwa biaya pendidikan mencakup pengelolaan pendapatan dan sumber daya yang ada untuk merancang dan melaksanakan kegiatan operasional pendidikan di berbagai tingkatan. Di lain sisi, Nanang Fattah menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan melibatkan keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaan pendidikan. Hal ini

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

meliputi pembayaran gaji guru, pengembangan profesional tenaga pendidik, administrasi sekolah, penyediaan alat dan buku pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan fasilitas dan infrastruktur sekolah, alat tulis kantor (ATK), supervisi pendidikan, serta kebutuhan lainnya (Azhari & Kurniady, 2017).

3.2 Strategi Pengalokasian Anggaran Pendidikan

Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang mencakup pelaksanaan ide, perencanaan, dan implementasi kegiatan dalam periode tertentu (Yuspiani & Hidayat, 2022). Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, strategi perencanaan menjadi elemen penting yang harus disusun berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal organisasi, termasuk sekolah. Selain itu, pelaksanaan strategi sangat dipengaruhi oleh hasil perumusan desain strategi yang telah direncanakan sebelumnya (Margareta & Ismanto, 2017).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan bagi setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memenuhi hak pendidikan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan amandemen UUD 1945, sekurang-kurangnya 20% dari total APBN harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan tidak boleh kurang dari 20%, meskipun alokasi yang lebih besar sangat disarankan karena berpotensi mempercepat kemajuan

di sektor pendidikan. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, baik fisik maupun nonfisik, guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan di masa depan (Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023).

Pengelolaan keuangan sekolah sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik dan pencapaian hasil belajar siswa. Di tengah tantangan ekonomi yang kian meningkat, pendanaan pendidikan menjadi isu yang sangat penting. Dengan mempertimbangkan alokasi dana per siswa dan dampak kebijakan perpajakan terhadap pendapatan, pengambilan keputusan keuangan sekolah harus dilakukan secara cermat dan seimbang. Penurunan jumlah siswa baru, berkurangnya pendapatan, serta meningkatnya kebutuhan fasilitas sekolah memaksa distrik sekolah untuk mengelola sumber dayanya dengan lebih efisien. Dalam situasi seperti ini, petugas keuangan sekolah yang memiliki kompetensi tinggi dapat menerapkan berbagai strategi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang terorganisir dan efektif.

1. Pantau Data, Kebijakan Publik, dan Peraturan Perundang-Undangan Secara Terus Menerus

Penting untuk memantau data seperti demografi siswa, capaian prestasi, tren pendaftaran, serta kebijakan pendanaan nasional, mengingat hubungan erat antara pendapatan daerah dan jumlah siswa. Analisis tren ini memungkinkan petugas keuangan sekolah membuat keputusan berbasis data, memproyeksikan kebutuhan masa depan, dan mengantisipasi tantangan secara proaktif. Pemangku kepentingan

merancang rencana strategis untuk periode tiga hingga lima tahun dengan fokus pada hasil pembelajaran siswa. Para pemangku kepentingan harus mengembangkan rencana strategis untuk periode tiga hingga lima tahun yang berfokus pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Rencana jangka panjang ini perlu dipecah menjadi langkah implementasi yang spesifik, dengan melibatkan staf pengajar dan pemimpin keuangan untuk memastikan anggaran tahunan mendukung tujuan yang telah ditetapkan.

2. Meminimalkan biaya administrasi yang tidak perlu

Penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi inefisiensi dalam administrasi, termasuk meninjau proses yang sudah tidak relevan. Pengelolaan yang efisien dapat memastikan dana diarahkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, terutama di ruang kelas. Biaya tersembunyi dan tidak langsung harus diperiksa secara mendalam untuk meningkatkan efisiensi operasional.

3. Kelola aset daerah dengan tepat

Kolaborasi antara petugas keuangan, administrator, dan staf fasilitas, diperlukan dalam manajemen aset yang strategis. Sehingga dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

4. Beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas

Kepercayaan masyarakat adalah kunci dalam pengelolaan keuangan. Petugas keuangan perlu berkomunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk dewan sekolah, pemimpin akademik, dan masyarakat, untuk mendorong



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

kolaborasi yang efektif. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam perencanaan jangka panjang dapat memperkuat dukungan terhadap tujuan strategis dan meningkatkan rasa percaya.

5. Tinjau strategi pengendalian biaya

Strategi pengendalian biaya harus ditinjau secara berkala, terutama terkait konsolidasi dan kontrak layanan dukungan sekolah. Meski peningkatan hasil siswa menjadi prioritas, proses bisnis juga perlu dioptimalkan untuk efisiensi operasional. Fokus utama harus tetap pada pengembalian investasi akademik (Ayu et al., 2024).

Manajemen keuangan sekolah yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan strategis yang melibatkan pemantauan data dan kebijakan publik secara berkesinambungan, perencanaan jangka panjang yang difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa, pengurangan biaya administrasi yang tidak perlu, pengelolaan aset secara sistematis, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, serta evaluasi berkala terhadap strategi pengendalian biaya. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kegiatan pendidikan, meningkatkan prestasi siswa, serta menjaga keberlanjutan operasional meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

3.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja Pendidikan

Penyusunan anggaran di sekolah diawali dengan merencanakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah ditentukan oleh tim, disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Dimana komponen anggaran meliputi biaya operasional, barang dan jasa, belanja modal, pemeliharaan fasilitas, perjalanan dinas, serta pengelolaan aset tetap. Namun, pemeliharaan fasilitas sering menjadi tantangan utama, sehingga diperlukan tinjauan mendalam terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun. Langkah selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang menjadi tahap akhir dalam manajemen keuangan pendidikan. Pada tahap ini, dilakukan refleksi atas hasil evaluasi dari semua pihak yang terlibat, sebagai dasar dalam menyusun anggaran berikutnya. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran agar menjadi lebih terstruktur, efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana secara optimal, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Kreativitas dan inovasi kepala sekolah dalam menggali sumber dana baru serta menempatkan sumber daya manusia yang tepat sangat berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan

keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Irma Susanti & Yusuf Muslihin, 2024).

Perencanaan anggaran belanja sekolah membutuhkan pemahaman menyeluruh dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan manajemen pendidikan. Proses penyusunan anggaran meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendekatan komparatif, evaluasi program perencanaan (PPBES), dan pendekatan berbasis fungsi, yang menitikberatkan pada analisis kebutuhan, prioritas, serta efisiensi sumber daya. Anggaran ini mencakup penerimaan dana dari berbagai sumber, termasuk pemerintah dan masyarakat, serta pengeluaran untuk operasional dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sebagai alat perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan koordinasi antarunit kerja, anggaran harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kejelasan tanggung jawab, sistem akuntansi yang baik, dan partisipasi dari semua pihak. Pengawasan anggaran bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan prinsip akurasi, ketepatan waktu, dan objektivitas, yang dilakukan oleh individu dengan kompetensi tinggi. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), prinsip kecermatan, keterperincian, dan kelengkapan menjadi dasar dalam menghadapi tantangan, seperti keterbatasan dana dan alokasi yang kurang tepat. Strategi

RAPBS mencakup pengintegrasian visi, pengembangan tujuan, tanggapan terhadap peluang dan ancaman, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pendidikan memerlukan investasi besar dan perencanaan yang teliti untuk menjawab tantangan global sekaligus mempersiapkan solusi bagi situasi tak terduga (Batubara, 2022).

Penyusunan anggaran sekolah merupakan proses penting yang diawali dengan perencanaan kegiatan berdasarkan program kerja dan alokasi dana yang tersedia, mencakup komponen seperti operasional, pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset. Pemeliharaan fasilitas, yang sering kali menjadi tantangan utama, membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Evaluasi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan pengelolaan anggaran agar lebih efisien, efektif, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan sumber dana melalui inovasi dan memastikan penempatan sumber daya manusia yang tepat guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3.4 Implementasi dan Monitoring Anggaran Pendidikan

Pemantauan keuangan sekolah adalah elemen penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya



keuangan yang efektif dan distribusi anggaran yang sesuai untuk kebutuhan sekolah. Langkah ini memberikan manfaat langsung bagi seluruh komunitas sekolah, terutama siswa. Selain itu, pemantauan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, seluruh dana pendidikan yang diterima dan digunakan sekolah dapat diakses oleh pemangku kepentingan, seperti komite sekolah, orang tua, dan pihak lain yang mendukung keberhasilan pendidikan. Upaya ini kemudian memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Prinsip dasar dalam penyusunan anggaran mencakup beberapa aspek penting, di antaranya: (a) Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi; (b) Sistem akuntansi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan anggaran; (c) Penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menilai kinerja organisasi; dan (d) Dukungan dari seluruh tingkat pelaksana, mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah.

Selain itu, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan anggaran adalah memastikan efisiensi dalam penggunaan dana sekaligus mengalokasikannya sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal dan sejalan dengan tujuan yang direncanakan.

Selanjutnya, pemantauan keuangan

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

melalui laporan keuangan berperan penting dalam mendukung keberhasilan sekolah, terutama dengan mengurangi risiko penyelewengan dan penyalahgunaan dana pendidikan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mencerminkan tanggung jawab sekolah untuk menggunakan dana secara efektif demi mendukung kegiatan pendidikan. Setiap laporan keuangan yang dihasilkan berfungsi sebagai catatan resmi pengelolaan keuangan dan harus dipertanggungjawabkan jika terjadi ketidaksesuaian atau jika diminta oleh instansi terkait (Mubin, 2018).

Dengan demikian, pengawasan anggaran bertujuan untuk menilai, membandingkan, dan mengevaluasi alokasi serta penggunaan dana guna mengukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Melalui pengawasan anggaran, organisasi dapat menilai sejauh mana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal. Prinsip pengawasan anggaran (Batubara, 2022) meliputi beberapa aspek berikut:

- a) Pengawasan dilakukan secara fungsional sejak tahap perencanaan, mencakup aspek penilaian kehematan, efisiensi, dan efektivitas pada seluruh kegiatan organisasi.
- b) Temuan dari pengawasan harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat terkait, termasuk penegak hukum, untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada.
- c) Fokus pengawasan diarahkan

pada bidang-bidang strategis yang relevan dengan manajemen organisasi.

- d) Kegiatan pengawasan diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara konseptual dan menyeluruh.
- e) Pelaksana pengawasan harus memiliki kompetensi teknis, dedikasi, sikap profesional, dan integritas tinggi.
- f) Informasi yang diperoleh harus akurat dengan tingkat kevalidan data yang tinggi.
- g) Pengawasan dilakukan tepat waktu sehingga hasilnya bisa segera digunakan untuk perbaikan.
- h) Pengawasan harus bersifat objektif dan menyeluruh.
- i) Tidak menyebabkan pemborosan sumber daya.
- j) Bertujuan untuk

Manajemen keuangan dan anggaran di lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas institusi pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya, terutama keuangan, harus dilakukan secara teliti, dengan mempertimbangkan prioritas dan tetap menjaga kualitas. Proses pengelolaan ini dimulai dengan penyusunan anggaran dan program pendidikan yang tercantum dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Selain itu, sumber pendanaan sekolah umumnya berasal dari Dana BOS, kontribusi Komite Sekolah, donatur tidak tetap, bantuan pemerintah, dan sumbangan masyarakat. Sehingga,

menyelaraskan pelaksanaan dengan rencana atau keputusan yang telah dibuat.

Memastikan pelaksanaan sesuai rencana, serta mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan agar tetap sejalan dengan tujuan awal.

Monitoring keuangan sekolah adalah langkah penting dalam memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh komunitas sekolah, terutama siswa. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Semua dana pendidikan yang diterima dan digunakan oleh sekolah harus dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, seperti komite sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi pada keberhasilan sekolah. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah akan terus diperkuat.

transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan mengingat bahwa dana tersebut merupakan amanah dari berbagai pihak, yang diwujudkan melalui laporan keuangan yang terperinci dalam RAPBS. Laporan ini disampaikan dalam rapat bulanan atau tahunan dan dapat dipublikasikan melalui media, seperti situs web resmi sekolah. Selain itu, evaluasi berkala sangat penting untuk menilai pencapaian tujuan dan efektivitas program yang telah dilaksanakan, memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan rencana dan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan.

4. KESIMPULAN

Anggaran pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

memastikan kelangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkat. Pengelolaan keuangan yang terencana dan profesional sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara maksimal. Proses pengelolaan ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung operasional dan fasilitas lembaga pendidikan.

Strategi pengalokasian anggaran pendidikan harus melibatkan pengawasan terhadap data keuangan, kebijakan publik, dan tren pendidikan yang relevan. Pendanaan harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan setiap institusi, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, analisis efisiensi operasional sangat diperlukan untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak esensial, sehingga dana dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran inti.

Proses penyusunan anggaran dimulai dengan perencanaan program kerja yang disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia, diikuti dengan pemantauan dan evaluasi berkala. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, guna mencegah penyalahgunaan. Hasil evaluasi anggaran akan menjadi acuan untuk meningkatkan perencanaan anggaran di masa depan, sehingga pengelolaan keuangan dapat

menjadi lebih efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen utama dalam memastikan keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan demikian, pelaporan keuangan yang terbuka kepada pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan masyarakat, menunjukkan komitmen institusi terhadap pengelolaan dana publik. Dengan pendekatan berbasis data, berorientasi pada hasil, dan memprioritaskan kebutuhan strategis, pengelolaan anggaran dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ayu, D. M., Girindratta, R., Nurfadillah, N., Fariz, F., & Mashur, M. Al. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah Untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1596–1603.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>
- Batubara, H. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran

- Pendapatan Belanja Pendidikan. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>
- Harefa, E., Afendi, A. R., Karuru, P., Sulaeman, & Wote, A. Y. V. (2024). *Buku Ajar: Teori Belajar dan Pembelajaran*.
- Irma Susanti, P., & Yusuf Muslihin, H. (2024). *Strategi Kepala Sekolah Mengelola Dana Pendidikan Menjadi Kunci Utama Peningkatan Mutu Sekolah Principal Strategy Managing Educational Funds Being The Main Key To Improving School Quality*. 24(1), 51–63. <https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69277>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Margareta, R. T. E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 195. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p195-204>
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2 SE-Articles), 80–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3366740>
- Rahmadoni, J. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sd Indonesian Creative School Pekanbaru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i2.1855>
- Rustiningrum, S., & Digdowiseiso, K. (2023). ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBSI UNSRAT) ALOKASI*, 10(2), 801–813.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Suryadarma, Y., & Haq, A. H. (2015). Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali. *At-Ta'dib*, 10(2), 362–381. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/460>
- Yuspiani, & Hidayat, M. (2022). Manajemen Keuangan Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 101–114. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v6i1.27>

Jurnal Global Scholar: Social and Political Sciences (JGSSP)

Vol. 02 No.01 : Januari (2025)

E-ISSN:

DOI:.....



<https://https://journal.journeydigitaledutama.com>